



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 4B /SEK/SK/II/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi reformasi birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M. PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 012A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 07A/KMA/SK/I/2013 tentang Penunjukan Koordinator Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang terdiri dari Tim Pengarah, Koordinator, Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat.
- KEDUA : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Ketua Mahkamah Agung.
- Anggota : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
- KETIGA : Membentuk Tim Pelaksana dengan susunan sebagai berikut :
- Penanggung Jawab : Sekretaris Mahkamah Agung.
- Koordinator : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- Asessor : Asessor Mahkamah Agung.
- Anggota : 1. Panitera Mahkamah Agung.
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
3. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

- KEEMPAT : Menunjuk Sekretariat dan Kelompok Kerja guna mendukung kelancaran tugas Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Tugas dan tanggung jawab Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A. S. PUDJOHARSOYO

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Mahkamah Agung RI;
 2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS MA-RI
 NOMOR : 4B /SEK/SK/II/2017
 TANGGAL : 28 Februari 2017

TIM SEKRETARIAT DAN TIM KELOMPOK KERJA
 ASESSOR REFORMASI BIROKRASI
 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No	Kedudukan Dalam Tim PMPRB	Nama	Jabatan
1	Tim Sekretariat		
	Ketua	Jeanny H.V.Hutauruk, SE., MM., Ak., CA	Sekretaris Ditjen Badimiltun.
	Wakil	Joko Upoyo Pribadi, SH., MH	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA.
	Sekretaris	1. Asnahwati SH., MH	Plt. Sekretaris Bawas.
		2. Supandi, SH., MH	Kepala Biro Umum BUA.
	Anggota	1. Dra. Any Dyah Wijayanti	Kabag Ortala Bawas.
		2. Drs. Mukhlisin	Kasubdit Syariah, Dit. Pratalak Ditjen Badilag.
		3. Rr. Herti Setiawati., SH., MH	Kasubdit Mutasi Panitera dan Jusrita Ditjen Badilum.
		4. Yefni Delfitri, SH., MH	Kabag Umum Bawas.
		5. Sugondo, SH., MH	Kabag Umum Balitbang Diklat Kumdil.
		6. R. Lucky Permana, SH., MH	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Bawas.
7. Muhammad Anis, SE., Ak., CA		Auditor Bawas.	
8. Rama Rahim, SE., MM., MBA		Auditor Bawas.	
9. Muhammad Huzaifah, S.Kom		Staf TI Bawas.	
2	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Asessor Area I)		
	Ketua	Dr. Tin Zuraida, SH., M.Kn	Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Balitbang Diklat Kumdil.
	Wakil Ketua	Agung Iswanto, SH., MH	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Ditjen Badimiltun.
	Sekretaris	1. Drs. R. Parto Hutomo D., SH., MM	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan.

		2. Asep Nursobah, S.Ag., MH	Hakim Yustisial/ Koordinator Kepaniteraan.
Anggota		1. Drs. H. Arifin Samsurijal, SH., MH	Kabag Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan dan Organisasi BUA.
		2. Rr. Sri Widyastuti, SH., MM	Kabag Bimbingan dan Monitoring Biro Perencanaan dan Organisasi BUA.
		3. Zahlisa Vitalita, SH	Kasubdit Mutasi Hakim Ditjen Badilum.
		4. Dismartini, SH., M.Hum	Kasubdit Tata Kelola Dit Pembinaan Adm Ditjen Badilum.
		5. Halomoan, SH., MM	Kasubdit Kasasi Pidana dan Tata Usaha Militer Ditjen Badimiltun.
		6. Roslina Napitupulu, SH., MH	Kabag Oganisasi dan Tata Laksana Ditjen Badilum.
		7. Drs. Muhidin., MH	Kabag Bina Sikap Mental Biro Umum BUA.
		8. Fany Widia, SE., MM	Kasubag Tata Laksana Biro Perencanaan dan Organisasi BUA.
		9. Jufri Hardi, ST., MH	Auditor Pratama Bawas.
3	Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Asessor Area II)		
	Ketua	Dr. Hasbi Hasan, MH	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag.
	Wakil Ketua	Drs. Wahyudin, M.Si	Direktur Pratalak Perkara Pidana Ditjen Badilum.
	Sekretaris	1. Yefni Delfitri, SH., MH	Kabag Umum Bawas.
		2. Jelli Rita Sinaga, SH., MH	Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis Militer Ditjen Badimiltun.
	Anggota	1. Darmoko Yuti Witanto, SH	Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas BUA.
		2. Sri Kuswahyutin, SH., MH	Kabag Kesekretariatan Pimpinan B Biro Sekretariat Pimpinan BUA.
		3. Ridho Taufiq, SH	Kabag Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas BUA.

		4. Kartono, SH., MH	Kasubdit Bingingis TUN Ditjen Badimiltun
		5. Rr. Irene Wijayanti, SH	Kabag Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas BUA.
		6. Subeno Trio Leksono, SH., MM	Kasubdit Bimbingan dan Monitoring Ditjen Badilag.
		7. Umiyati, SH	Kasubdit. Tata Kelola Ditjen Badilag.
		8. M. E. R. Herki Artani. R., SH., MH	Fungsional Perpustakaan.
		9. Sarno, SH., MH	Kasubag Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum Biro Hukum dan Humas BUA.
		10. Apriyadi R. Kardono, SE., Akt., CA	Auditor Pratama Bawas.
4	Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi (Asessor Area III)		
	Ketua	Drs. Muhamad Ashar, SH., MH	Kepala Biro Perlengkapan BUA.
	Wakil Ketua	Tukiran, SH., MM	Sekretaris Ditjen Badilag.
	Sekretaris	Ardaning Sandrawati, SH., MH	Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan BUA.
	Anggota	1. Jimmy Maruli, SH., MH	Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas BUA.
		2. Sudarsono, SH., MH	Hakim Yustisial/Asisten Dit. Bingingis Peradilan TUN Ditjen Badimiltun.
		3. Kuntadi, SH., MH	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Balitbang Diklat Kumdil.
		4. Widiyanti, SH., MH	Kabag Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Badimiltun.
		5. Bambang Subroto, SH., MM	Kabag Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Badilag.
		6. Sudiasih, SH., MH	Kasubdit Kasasi Pratalak Perdata Ditjen Badilum.
		7. Raden Junida Hasta Kusumah, SHI., MH.	Kasubag Kelembagaan dan Pelaporan Ditjen Badimiltun.
		8. Mayor Datzun Riyanto, SH	Kasi Mutasi Panitera dan Jurusita Ditjen Badimiltun.
		9. Nurdiansyah, SH., MM	Auditor Pratama Bawas.

5	Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana (Asessor Area IV)	
Ketua	Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos., M.Hum	Sekretaris Ditjen Badilum.
Wakil Ketua	Dr. H. Haswandi, SH., SE., M.Hum	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Ditjen Badilum.
Sekretaris	Sahwan, SH., MH	Kabag Penyusunan Rencana Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi BUA.
Anggota	1. Dra. Murdiyati	Kabag Keuangan Kepaniteraan.
	2. M. Amirullah Sholeh, SH., MM	Kasubdit Data dan Evaluasi Dit. Binganis Ditjen Badilum.
	3. Lies Khadijah, SH., MH	Kasubdit Statistik dan Dokumentasi Dit. Bin. Adm. Ditjen Badilum.
	4. Nuraini, SH., MH	Kasubdit PK dan Grasi Pidana Militer Ditjen Badimiltun.
	5. Wiwik Windarwati, SH., MM	Kabag Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Balitbang Diklat Kumdil.
	6. Sutarno, SIP., MM	Kabag Umum Ditjen Badilag.
	7. Purwanti, SH., MM	Kasubag Kepegawaian Kepaniteraan.
	8. Imam Purnomo, SE., Ak, CA	Auditor Muda Bawas.
6	Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM (Asessor Area V)	
Ketua	Drs. Agus Zainal Mutaqien, SH., MH	Kepala Biro Kepegawaian BUA.
Wakil Ketua	Pujiono Ahmadi, SH., MH	Sekretaris Kepaniteraan.
Sekretaris	1. Jumadi, SH., MH	Kabag Umum Kepegawaian BUA.
	2. Sri Kamala Dewi, SH., MH	Kabag Kepegawaian Bawas.
Anggota	1. Budi Suhariyanto, SH., MH	Ahli Peneliti Muda Puslitbang Kumdil Balitbang Diklat Kumdil.
	2. Maliki, SH	Kabag Kepegawaian Ditjen Badilum.
	3. Drs. Rafiudin, MH	Kabag Kepegawaian Ditjen Badilag.
	4. Mahjum, SH., MH	Kabag Kepegawaian Ditjen Badimiltun.

		5. Drs. Erwin Widanarko, SH., S.AP., M.Pd	Kabag Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian BUA.
		6. Hanizar, SH., M.Si	Kabag Pemberhentian dan Pensiun Biro Kepegawaian BUA.
		7. Sutrisno, S.HI	Auditor Kepegawaian Pertama Bawas.
7	Kelompok Kerja Akuntabilitas (Asessor Area VI)		
	Ketua	Sutisna, S.Sos., M.Pd	Kepala Biro Keuangan BUA.
	Wakil Ketua	Partini, SH	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Ditjen Badilum.
	Sekretaris	Kurnia Arry Soelaksono, SE, SH	Kabag Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilum.
	Anggota	1. Santoso, SH	Kabag Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badimiltun
		2. Irwansyah, SH., MH	Kabag. Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan BUA
		3. Sadik Rafi'i, SH., MM	Kasubag Evaluasi Biro Perencanaan dan Organisasi BUA.
		4. Naulina B. I. Sianturi, SH., MH	Kasubag Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi BUA.
		5. Sadikin, SH., MH	Kasubag Akuntabilitas Biro Perencanaan dan Organisasi BUA.
		6. Edi Yuniadi, S.Sos., MM	Kasubag Analisa Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi BUA.
		7. Lamtur Pandapotan Simanullang, SE	Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan Ditjen Badimiltun.
		8. Marwendi Putra, ST., MM	Auditor Pratama Bawas.

8	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan (Asessor Area VII)		
	Ketua	Asnahwati, SH., MH	Plt. Sekretaris Bawas.
	Wakil Ketua	Dr. Fauzan, SH., MH., MM	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Ditjen Badilag.
	Sekretaris	1. Muhammad Anis, SE., Ak., CA	Auditor Muda Bawas.
		2. Rama Rahim, SE., MM., MBA	Auditor Muda Bawas.
	Anggota	1. Dra. Any Dyah Wijayanti	Kabag Organisasi dan Tata Laksana Bawas.
		2. Sodikin, SE, SH., MH	Kabag Perencanaan dan Keuangan Bawas.
		3. Letkol (CHK) Anton Maruli Tambunan, SH	Kasi Mutasi Hakim Ditjen Badimiltun.
4. R. Lucky Permana, SH., MH		Kasubag Dokumentasi dan Informasi Bawas.	
5. Ferri Taufik Ferdiansyah, SE., Ak., CA		Auditor Muda Bawas.	
6. Muhammad Adzkiya, SE., M.Acc, CA		Auditor Muda Bawas.	
7. Andi Yusuf Sukiman, SE., Ak., MM		Auditor Pratama Bawas.	
9	Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Asessor Area VIII)		
	Ketua	Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH	Kepala Biro Hukum dan Humas BUA.
	Wakil Ketua	Dr. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Ditjen Badimiltun.
	Sekretaris	Dedi Waryoman S.Sos., MH	Kabag Umum Ditjen Badimiltun.
	Anggota	1. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu SH., MH	Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas BUA.
		2. Enrico Simanjuntak, SH., MH	Hakim Yustisial/ Asisten Dit. Bingham Peradilan TUN Ditjen Badimiltun.
		3. Rr. Herti Setiawati, SH., MH	Kasubdit Mutasi Panitera dan Jurusita Dit. Bingham Peradilan Umum Ditjen Badilum.
		4. Junaedi Kamaludin, SE., M.Si	Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Dit. Bingham Peradilan Umum Ditjen Badilum.
5. Jamaludin, SH		Kabag Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan BUA.	

	6. David Mangara Toga Simanjuntak, SE., MH	Kabag Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Humas BUA.
	7. Supriyadi Gunawan, S.Sos., MM	Kabag Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas BUA.
	8. Dwi Maria Puspitasari, S.Kom, MM	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Ditjen Badimiltun.
	9. Hendra Rahmadani, S.Kom	Auditor Pratama Bawas.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS MA-RI
NOMOR : 4B /SEK/SK/II/2017
TANGGAL : 28 Februari 2017

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGARAH, TIM PELAKSANA,
TIM SEKRETARIAT DAN TIM KELOMPOK KERJA

1. Tim Pengarah bertugas :
 - Memberikan arahan mengenai garis-garis besar program reformasi birokrasi Mahkamah Agung.
 - Melakukan Pengawasan terhadap proses reformasi birokrasi Mahkamah Agung secara umum berdasarkan garis-garis besar program reformasi birokrasi.
2. Tim Pelaksana bertugas :
 - Melakukan perencanaan strategis pelaksanaan proses reformasi birokrasi berdasarkan seluruh cetak biru.
 - Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok kerja serta tim lainnya yang akan dibentuk sesuai kebutuhan teknis.
 - Mengkoordinir penentuan usulan-usulan untuk melengkapi cetak biru yang telah disusun, baik yang diusulkan pihak-pihak di dalam Lingkungan Peradilan maupun di luar Lingkungan Peradilan.
 - Mengawasi pelaksanaan perencanaan tersebut, termasuk di dalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan reformasi birokrasi, pemenuhan target waktu, kesesuaian pelaksanaan proyek dengan cetak biru.
 - Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran.

3. Sekretariat Reformasi Birokrasi bertugas :
 - Membantu tugas-tugas Tim Pengarah dan Koordinator Tim Pelaksana.
 - Membantu Koordinator dalam melakukan koordinasi antara Tim Kelompok Kerja.
 - Membantu Koordinator Tim Pelaksana dalam melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi kepada para pemangku kepentingan terkait.
4. Kelompok Kerja bertugas :
 - Melakukan perencanaan teknis pelaksanaan proses reformasi birokrasi.
 - Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan teknis yang ada di dalam kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan proses reformasi birokrasi.
 - Mengawasi pelaksanaan perencanaan teknis tersebut, termasuk di dalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan reformasi birokrasi, pemenuhan target waktu dan kesesuaian pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - Mendukung Koordinator Tim Pelaksana dalam melakukan koordinasi antar area untuk mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya dan capaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

- Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Tim Kelompok Kerja harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang reformasi birokrasi, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO